



**BAPPENAS**

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online*

SUBJEK

SARANA DAN PRASARANA

Rabu, 23 Agustus 2023

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan**  
**2023**

## **Daftar Isi**

1. RPJPN 2025 – 2045, MENGANKAT MARTABAT YANG TERLUPAKAN – *Media Online Kompas*
2. TERAPKAN BANGUNAN HIJAU INDONESIA BUTUH US\$ 200M – *Media Online Media Indonesia*

# KOMPAS

Rabu

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

23 Agustus 2023

## RPJPN 2025-2045, Mengangkat Martabat yang Terlupakan

H Asep Saefuddin

Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Guru Besar FMIPA IPP, Ketua Tim RPJPN ICMi Bidang Pendidikan

Menjadikan Indonesia sebagai negara maju adalah harapan bersama dan sebuah keniscayaan. Membangun negeri harus dimulai dengan mencerdaskan manusianya lebih dahulu.

Banyak contoh di mana negara-negara yang *starting point* waktu pembangunannya relatif sama dengan Indonesia pasca-Perang Dunia II—seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan India—berusaha sejak awal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis pendidikan, sekaligus memandang pembangunan pendidikan adalah investasi. Mereka meyakini, membangun negeri harus dimulai dengan mencerdaskan manusianya terlebih dahulu.

Hasilnya, kemajuan yang berarti. Bahkan dalam beberapa hal telah berada di depan negara maju. Ini menjadi dasar penulis mengatakan memajukan Indonesia setara dengan negara maju lainnya adalah keniscayaan. Syaratnya, pendidikan diprioritaskan.

**Visi-misi RPJPN 2025-2045**  
Periode Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 akan berakhir. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah menyiapkan draf RPJPN 2025-2045. Meski dibuat pada 2023, rancangan ini akan bermanfaat sebagai pedoman kerja para presiden terpilih hingga empat periode ke depan, beserta kabinet bentuk masing-masing.

RPJPN 2025-2045 di bawah panji Indonesia Emas 2045 tersebut memiliki visi: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Filosofi RPJPN ibarat sebuah misi besar pendakian gunung, yang keberhasilannya ditandai dengan berkibarnya bendera merah-putih di puncaknya.

Untuk misi ini perlu perencanaan dan persiapan saksama agar tak banyak aral melintang. Rute dan waktu pendakian perlu direncanakan. Semua faktor penghambat harus dapat dieliminasi agar waktu jelajah, ketahanan, keutuhan, dan kesolidan tim dapat dipertahankan sampai di puncak pendakian.

Demikian pula pencapaian RPJPN 2025-2045 dalam arus *megatrend* yang kuat dipengaruhi teknologi digital: teknologi informasi, teknologi robotika, teknologi industri, dan perubahannya yang demikian cepat, ibarat cuaca, sulit diprediksi. Bisakah kita bayangkan situasi disruptif teknologi 20 tahun mendatang?

Para ahli pun sulit mengatakannya, kecuali memberi ciri-cirinya, bahwa teknologi robotika akan menggantikan tugas besar dan pekerjaan rutin manusia. Pada saat itu, manusia bekerja tetap berkecukupan, tetapi kualitas pekerjaan mereka ibarat 10 banding 1.

Jika sebuah pekerjaan saat ini perlu dikerjakan 10 tenaga manusia, nanti pekerjaan itu cukup dilakukan seorang saja. Jika penyelesaian satu pekerjaan saat ini butuh waktu sepuluh jam, kelak cukup dikerjakan satu jam saja. Gambaran modernitas 20 tahun ke depan, dunia dipenuhi orang-orang yang menguasai sains dan keahlian-keahlian spesifik. Indonesia pun bisa, caranya dengan segera membenahi pendidikannya.

Pada sepuluh tahun mendatang, dunia juga diprediksi akan dipenuhi kelompok wirasaha (*entrepreneur*) yang jumlahnya sebanding dengan luasnya peluang yang diberikan dunia usaha global. Kelompok wirasaha global ini akan masuk juga ke Indonesia mencari celah bisnis dan berusaha melakukan transaksi yang menguntungkan.

Akan saling menguntungkan (*win-win*) jika kedua belah pihak memiliki keahlian kewirausahaan (*entrepreneurship*) seimbang, tetapi ketidakseimbangan keahlian dapat merugikan SDM Indonesia dalam banyak hal.

Pertanyaannya, seberapa dipentingkannya pendidikan kewirausahaan dalam RPJPN 2025-2045? Pembekalan apa yang akan diberikan kepada generasi penerus dalam balaian visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan? Ini yang harus terjawab dalam RPJPN 2025-2045.

Tahun 2045 adalah puncak pendakian bagi RPJPN 2025-2045. Pencapaian 100 tahun kemerdekaan, yang akan merapakan tahun emas Indonesia.

Saat itu bangsa Indonesia diproyeksikan telah menjadi negara maju dan cita-citanya masuk lima besar negara di dunia dengan ekonomi terkuat. Sebuah usaha mulia, tetapi perlu disikapi dengan serius dan kerja keras.

Generasi yang akan mewarnai Tahun Emas 2045 adalah anak-anak yang pada 2023 ini duduk di bangku sekolah, mulai dari PAUD/TK, SMP, hingga SMA.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, ada 44,19 juta pelajar (tingkat TK, SD, SMP, SMA) pada tahun ajaran 2022/2023. Jumlah yang sangat besar dan dominan jika diproyeksikan sungguh-sungguh untuk menguasai sains dan keahlian spesifik. Sayangnya, dari 44 juta pelajar, yang lulus SMA hanya 3,6 juta per tahun, dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 1,3 juta.

Data BPS 2022 menyebutkan, 55,43 persen angkatan kerja di dominasi lulusan SMP ke bawah, dan 39,10 persen tenaga kerja didominasi tamatan SD ke bawah. Masih didominasi generasi yang teronggok di pendidikan rendah. Ini menyebabkan kapasitas dan peluang pekerjaan mereka terbatas pada pekerjaan kasar dan buruh. Itu persoalan yang harus segera dibenahi.

Pembenahan itu perlu serius. Jumlah guru (TK/SD/SMP/SMA) bersertifikat, misalnya, masih di bawah 50 persen. Harus segera ditingkatkan. Demikian juga disparitas partisipasi pendidikan kota-desa, ibu kota provinsi-daerah yang masih tinggi. Masih ada 302 kecamatan belum tersedia SMP/MTs, sebanyak 727 kecamatan tanpa ketersediaan SMA/MA, dan 27.963 sekolah tanpa internet, bahkan 3.639 sekolah tanpa listrik.

Istilah pendidikan lainnya: World Population Review 2021 menempatkan mutu pendidikan Indonesia di peringkat ke-54 dari 78 negara. Cukup rendah. Global Human Capital Report menempatkan pendidikan Indonesia di peringkat ke-65 dari 130 negara karena kurangnya minat belajar dan literasi.

Riset UNESCO-Global Education Monitoring (GEM) Report 2016 menempatkan mutu pendidikan di Indonesia pada urutan ke-9 dari 14 negara berkembang lain. Adapun indeks kecakapan bahasa Inggris berdasarkan Survey Education First (IEF) terhadap 21 juta orang dari 111 negara menempatkan Indonesia di urutan ke-81.

**Apresiasi Bappenas**  
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, "Cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya Indonesia telah keluar dari jebakan negara berpendapatan kelas menengah. Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk lima besar negara ekonomi terkuat di 2045".

Jadi, bukan saja sudah keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah, melainkan juga bisa termasuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat. Penulis sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Optimisme penting. Tidak ada yang tidak mungkin jika dilakukan dengan strategi tepat yang didukung kesiapan lainnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharto Monardji juga mengatakan, pembangunan dalam 20 tahun ke depan harus menggunakan paradigma baru.

Menurut Suharto, "Reformasi saja tidak cukup. Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berdasarkan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan."

**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Berkelanjutan**  
Dengan semangat transformasi itu, dibentuklah Visi RPJPN 2025-2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yang penjabarannya, sebagai berikut.

Negara kepulean yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Indonesia sebagai negara maju, ekonominya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. "Maju" juga dimaknai sebagai negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik.

Dalam penjabaran visi ini, ada tiga kali kata *ekonomi* diketikkan, yaitu dalam penjelasan tentang Negara Nusantara, Maju, dan Berkelanjutan. Dari situ, sudah cukup mengambarkan ke mana sasaran RPJPN 2025-2045.

Penulis mengapresiasi Bappenas yang telah bekerja keras menyusun RPJPN 2025-2045 dan memperhatikan masukan-masukan yang berarti dari para pemangku kepentingannya didasari semangat kepentingan nasional.

Rancangan akhir RPJPN 2025-2045 tampak sangat concern pada prestasi pembangunan fisik dan ekonomi. Proyeksinya masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat dunia. Meningkatkan melalui bidang pendidikan.

Konsep RPJPN 2025-2045 tampaknya lebih meyakini bahwa pembangunan manusia akan berjalan seimbang dengan pencapaian kemajuan ekonomi (lihat pengertian "berkelanjutan": seimbang dengan pembangunan sosial). Jadi, kemajuan pendidikan mengikhti kemajuan ekonomi. Ada kesan kurang diyakininya peran pendidikan sebagai landasan utama pembangunan.

Hai ini juga tampak dari pengelompokan bidang pendidikan dengan bidang kesehatan dan penunasan kemiskinan. Ketiganya dikelompokkan dalam tajuk bernama "modal sosial", "pembangunan sosial", dan "transformasi sosial".

Lalu dimunculkanlah tujuan/misi bidang kesehatan; sehat; misi bidang pendidikan: cerdas dan terpelajar; dan misi penunasan kemiskinan: terlindungi dan sejahtera.

Penulis berpandangan, tujuan/misi "cerdas dan terpelajar" menunjukkan level semangat yang masih normatif. Transformasinya belum tampak. Me-

nurut penulis, transformasi bidang pendidikan menghadapi arus globalisasi, perlu mengemban misi SDM Berkahlah Mulia, Berkarakter Unggul, Berdaya Saing. Misi ini akan mengarahkan bangsa dan negara Indonesia jadi bermartabat.

Cerdas dan terpelajar tanpa akhir mulia tidaklah cukup untuk membangun martabat.

Pengembangan bidang pendidikan harus dipandang sebagai landasan pembangunan bangsa dan negara, yang karenanya pembangunan pendidikan harus dipandang sebagai investasi.

Perlakuannya perlu diprioritaskan agar persoalan bidang pendidikan tuntas di dalam sepuluh tahun mendatang (2025-2035) sehingga sepuluh tahun selanjutnya (2035-2045) menghasilkan SDM yang potensial mengukuti target pencapaian Indonesia Emas 2045.

Target pembangunan manusia dalam RPJPN 2025-2045 sebaiknya diulas secara khusus karena bersamaan dengan pendidikan agama dan pendidikan karakter untuk membangun akhlak dan keungulan.

Pengembangan pendidikan masa depan harus dilengkapi dengan pendidikan keterampilan, kewirausahaan, dan penguasaan bahasa asing yang sangat diperlukan oleh generasi pelanjut negeri untuk penguatan daya saing.

**Investasi pendidikan**  
Manfaat utama investasi pendidikan adalah membangun pendidikan yang kuat karena pendidikan itu sendiri landasan utama pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan yang kuat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Sudah banyak studi empiris dan bukti tentang keterkaitan antara pendidikan dan kemajuan ekonomi. Romer (1985, 1990, 1994) menjelaskan investasi pendidikan dan akumulasi modal manusia yang mendorong pertumbuhan dari dalam (*endogenous growth*) sebagai pendorong dan pendorong pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang.

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyuguhkan kesenangan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 6.000 karakter dengan spasi. Kirim ke [www.kompas.id/kirim-opini](http://www.kompas.id/kirim-opini)

Hlm: 6 - Kolom: Opini



Rabu, 23 Agustus 2023

## Terapkan Bangunan Hijau Indonesia Butuh US\$200 M

*Dalam merealisasikan konsep green building Indonesia menghadapi hambatan keuangan, yaitu tingginya uang muka dan terbatasnya akses ke permodalan.*

**M ILHAM RAMADHAN AVISENA**  
ilham@mediaindonesia.com

**M**ENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia butuh dana hingga US\$200 miliar dalam 10 tahun ke depan untuk mengimplementasikan konsep hunian *green building*, sebuah konsep bangunan yang ramah lingkungan.

"Jadi, dengan kata lain, pemerintah harus bekerja sangat keras untuk memanfaatkan opsi pembiayaan yang men-

dukung proyek pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujarnya dalam Seminar on Energy Efficient Mortgage (EEM) Development Throughout ASEAN Countries di Jakarta, kemarin.

Merujuk pada laporan International Finance Corporation (IFC), wilayah Asia Pasifik membutuhkan dana sekitar US\$17,8 triliun untuk membangun perumahan tempat tinggal berkonsep hijau. Kebutuhan dana itu, kata Sri Mulyani, hanya dapat dipenuhi melalui solusi pembiayaan inovatif dan kolaboratif dari

banyak negara lainnya.

Namun, itu juga mesti dibarengi dengan belajar dari negara lain yang telah mencatatkan capaian positif dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diperlukan meski sedianya Indonesia telah mengadopsi langkah-langkah pembangunan berkelanjutan dari sisi gedung fisik dengan menekankan prinsip bangunan hijau.

"Karena di Indonesia itu ternyata kebutuhan akan pembangunan gedung baru terus meningkat dan berkembang, dan perjalanan menuju konstruksi yang berkelanjutan itu masih menemui banyak kendala," terang Menkeu.

Kendala yang dihadapi Indonesia, lanjut dia, berupa hambatan keuangan yang ditandai dengan tingginya biaya uang muka dan terbatasnya akses

ke permodalan. Padahal dua hal itu memiliki peranan penting bagi pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mengadopsi efisiensi energi.

Dengan adanya investasi yang masuk di sektor pembangunan berkelanjutan, imbuh Sri Mulyani, bencana alam yang kerap dialami kawasan hunian dapat ditekan.

"Bangunan yang berkelanjutan akan meminimalkan kerentanan terhadap banjir, kebisingan, dan polusi cahaya serta meminimalkan polusi emisi, air, dan tanah. Pembangunan berkelanjutan juga memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai target SDG's kami," jelas Sri Mulyani.

### Sertifikat untuk SMI

Di kesempatan terpisah, PT Sucofindo memberikan sertifi-

kat *Green Building (GreenShip)* dengan kategori platinum untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), kemarin.

Direktur Utama Sucofindo Jobi Triananda menyampaikan bahwa pemberian sertifikat tersebut sebagai wujud apresiasi Sucofindo atas komitmen PT SMI dalam mengelola perusahaan menggunakan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

"Kami mengapresiasi atas komitmen PT SMI dalam pemberian sertifikat *Green Building*, khususnya untuk skema *greenship interior space*. Sertifikat ini merupakan bukti PT SMI telah mengelola infrastruktur dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan," katanya.

Jobi menjelaskan, sertifikat *Green Building* yang dikeluarkan sejalan dengan upaya perusahaan dalam mendukung pengurangan emisi, meminimalkan jejak karbon, pengelolaan sampah perkantoran dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), serta mendorong pendekatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam operasi bisnisnya. (Ant/E-2)